



EVALUASI KINERJA MELALUI RESHUFFLE KABINET KERJA JOKOWI TAHUN 2015

Dewi Sendhikasari D*)

Abstrak

Perombakan atau reshuffle kabinet telah resmi diumumkan oleh Presiden Jokowi. Dalam Keputusan Presiden RI bernomor 79/P/2015, terdapat 6 anggota Kabinet Kerja Pemerintahan Jokowi-JK yang diganti oleh Presiden Jokowi. Menurut Presiden Jokowi, keputusan reshuffle kabinet adalah untuk memperkuat kinerja pemerintah dalam rangka percepatan implementasi program aksi pembangunan nasional. Melalui reshuffle kabinet ini, diharapkan dapat memberikan perubahan pada kondisi bangsa ke arah yang lebih baik. Untuk itu, pekerjaan selanjutnya menyangkut keperluan monitoring dan evaluasi kinerja kabinet secara berkala.

Pendahuluan

Isu perombakan atau *reshuffle* kabinet sudah bergaung sejak beberapa bulan yang lalu dan menjadi sorotan publik. Beragam argumentasi mulai dari relawan Jokowi hingga ke kritik tajam dari sejumlah kalangan, sudah meluncur sejak lama. Walaupun begitu, semua argumen dan kritik tersebut, belum membuat Presiden Jokowi bergeming sampai akhirnya tiba di penghujung Juni 2015, perombakan kabinet pun kemudian seolah didorong dan disegerakan. Sejak saat itu, komunikasi intensif tentang *reshuffle* kabinet mulai bergulir. Presiden Jokowi mulai mengumpulkan sejumlah referensi pertimbangan dari mulai Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia

Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Dewan Pertimbangan Presiden hingga ke sejumlah ahli ekonomi.

Keputusan Presiden Jokowi merombak kabinet pemerintahannya diakui sebagai bentuk langkah percepatan kerja. Dalam pernyataannya yang disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, terdapat satu dasar kuat perombakan ini, yakni masalah ekonomi. Menurutnya, ada dinamika yang terjadi di tingkat global maupun nasional, terutama sekali dalam dinamika ekonomi yang membutuhkan respons yang sangat cepat dari pemerintah. Hal ini tidak berlebihan karena kita harus mengakui, ekonomi Indonesia pada masa pemerintahan baru ini memang melemah.

*) Peneliti Muda Kebijakan dan Administrasi Publik pada Bidang Politik Dalam Negeri, Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, Email: sendhik@gmail.com.

Info Singkat

© 2009, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI)
Sekretariat Jenderal DPR RI
www.dpr.go.id
ISSN 2088-2351



9 772088 235001

Nilai rupiah anjlok, pertumbuhan ekonomi melambat hingga kisaran 4,71 persen pada kuartal pertama 2015. Angka pengangguran bertambah menjadi 7,45 juta hingga ke serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang berjalan lamban. Kondisi ini pun diperburuk dengan jeleknya komunikasi antarlembaga pemerintahan. Akibatnya, persepsi investor terhadap Indonesia pun ikut terseret ke arah negatif.

Selain itu, setelah adanya *reshuffle* Kabinet Kerja tahun ini, Presiden Jokowi wajib memastikan bahwa perombakan kabinet ini bukanlah bentuk lain dari konsolidasi politik tetapi murni untuk perbaikan kondisi ekonomi. Karena itu, pekerjaan rumah besar yang diemban sejumlah nama dan posisi baru yang diberikan kepada menteri yang ditunjuk oleh Presiden Jokowi dinanti rakyat. Keputusan Presiden Jokowi dalam melakukan *reshuffle* kabinet dapat dilihat sebagai suatu bentuk kebijakan publik. Kebijakan publik menentukan keberhasilan dan kegagalan pembangunan setiap negara. Penggantian posisi menteri yang merupakan pembantu Presiden diharapkan dapat menetapkan kebijakan yang lebih optimal dan tepat sasaran, sehingga mampu memperbaiki berbagai persoalan yang sedang terjadi di Indonesia saat ini.

Kinerja Kabinet Kerja

Kabinet Kerja pemerintahan Jokowi-JK memang selalu menjadi perhatian publik terutama terkait kinerjanya yang belum genap satu tahun ini dalam menyelesaikan berbagai permasalahan nasional. Hal ini dapat dilihat dari berbagai survei yang dilakukan sejumlah lembaga. Lembaga *Poltracking* misalnya, melakukan survei terkait kinerja dan *reshuffle* kabinet. Survei ini dilakukan terhadap 1.200 responden di 34 provinsi pada 23-30 Maret 2015. Adapun metode yang digunakan ialah *multistage random sampling* dengan cara tatap muka. Tingkat *margin of error* survei ini 2,9 persen dan survei ini dibiayai oleh *Poltracking*. Dari hasil survei yang dirilis pada 19 April 2015 yang lalu dapat dilihat bahwa sebanyak 36 persen responden menyatakan setuju apabila dilakukan perombakan kabinet. Sebanyak 5,8 persen responden lainnya menyatakan sangat setuju. Hanya 24,1 persen responden

yang kurang setuju dan 3,9 persen sangat tidak setuju. Sisanya, sebanyak 30,2 persen responden mengaku tidak tahu atau tidak menjawab. Menurut Direktur Eksekutif *Poltracking* Hanta Yudha, total jumlah yang setuju dengan *reshuffle* kabinet sebanyak 41,8 persen dan lebih besar dari yang tidak setuju. Dari hasil survei terlihat, 66 persen responden menegaskan paling tidak puas dengan kinerja pemerintah di bidang ekonomi. Hal ini disebabkan karena tingginya harga kebutuhan pokok yang tidak diimbangi dengan naiknya pendapatan masyarakat. Selain itu, sebanyak 55 persen publik juga tidak puas dengan kinerja di bidang hukum dan pemberantasan korupsi. Hal ini terkait dengan kisruh antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri yang terjadi beberapa waktu lalu.

Selain itu, Kompas juga melakukan survei yang dirilis pada 6 Juli 2015 yang lalu. Survei ini menggunakan Metode Jajak Pendapat melalui telepon dengan melibatkan sebanyak 610 responden. Dengan usia minimal 17 tahun, survei ini pun melibatkan responden tersebut yang berasal dari kota-kota besar, yaitu Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Denpasar, Banjarmasin, Pontianak, Makassar, dan Manado. Artinya, hasil survei yang didapatkan dari para responden diambil secara objektif dan bersifat independen karena diambil dari penduduk di kota-kota besar yang relatif mapan secara ekonomi dan maju secara pendidikan.

Dari empat pertanyaan yang diajukan mengenai Kabinet Kerja Jokowi-JK, berikut hasil yang didapatkan dari survei tersebut:

1. Kepuasan terhadap kinerja Kabinet Kerja: 59,3 persen masyarakat tidak puas; 36,2 persen puas; dan 4,5 persen tidak tahu/ tidak jawab.
2. Penempatan posisi para menteri di Kabinet Kerja: 63,15 persen belum tepat; 20,8 persen sudah tepat; 16,1 persen tidak tahu/ tidak jawab.
3. Perlu *reshuffle* dalam waktu dekat: 49,3 persen perlu; 42,5 persen tidak perlu; dan 8,2 persen tidak tahu/ tidak jawab.
4. Non partai menteri akan membuat kinerja kabinet lebih baik: 57,7 persen yakin; 33 persen tidak yakin; dan 9,3 persen tidak tahu/ tidak jawab.

Sebagaimana diketahui, mayoritas publik menilai tidak puas dengan kinerja Kabinet Jokowi disebabkan karena lemahnya bidang perekonomian. Sebanyak 64,3 persen publik menyatakan ketidakpuasannya dengan para menteri-menteri bidang ekonomi dalam menjaga stabilitas kebutuhan pokok. Ketidakpuasan publik di bidang ekonomi tersebut juga tercermin dari kekecewaan mereka terhadap pembangunan, khususnya di wilayah perbatasan (44,1 persen). Dalam konteks ini, kita dapat memahami ketika kinerja Menteri Koordinator Perekonomian mendapat nilai ketidakpuasan tertinggi (64,8 persen) di antara 3 menteri koordinator lainnya, yaitu Menko Bidang Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan (54,1 persen), Menko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (51,8 persen) dan Menko Bidang Kemaritiman (28 persen).

Reshuffle Kabinet

Reshuffle kabinet yang telah dilakukan Presiden Jokowi merupakan perombakan pertama yang dilakukan setelah mengumumkan 30 menteri dan empat menteri koordinator yang dinamakan Kabinet Kerja pada akhir Oktober 2014 yang lalu. Dalam Keputusan Presiden RI bernomor 79/P/2015, terdapat 6 anggota Kabinet Kerja Pemerintahan Jokowi-JK yang diganti oleh Presiden Jokowi. Dalam keputusan yang dibacakan di Istana Negara, 12 Agustus 2015, Presiden Jokowi memberhentikan 5 menteri. Mereka adalah Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno, Menteri Koordinator Kemaritiman Indroyono Soesilo, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Andrinov Chaniago, Menteri Perdagangan Rahmat Gobel. Selain itu, Presiden juga memberhentikan Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto. Presiden Jokowi kemudian mengangkat beberapa nama untuk menggantikan posisi tersebut, yaitu Darmin Nasution sebagai Menko Perekonomian, Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Menko Polhukam, Rizal Ramli sebagai Menko Kemaritiman, Sofyan Djalil sebagai Menteri PPN/Kepala Bappenas, dan Thomas Lembong sebagai Menteri Perdagangan. Presiden juga mengangkat Pramono Anung

sebagai Sekretaris Kabinet.

Dalam pidato kenegaraannya, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah mengakui, masih banyak persoalan yang menghadang. Sampai hari ini ketidakstabilan harga pangan masih terjadi, kesenjangan kaya dan miskin dan antarwilayah masih terbuka, praktik korupsi masih berlangsung, dan penegakkan hukum belum sepenuhnya kokoh. Oleh karena itu, dia berjanji pemerintah akan bekerja keras untuk memerangi persoalan tersebut. Salah satu upaya yang dilakukannya guna memerangi persoalan di atas adalah *reshuffle* kabinet. Menurut Presiden Jokowi, keputusan *reshuffle* kabinet adalah untuk memperkuat kinerja pemerintah dalam rangka percepatan implementasi program aksi pembangunan nasional. Perombakan kabinet tersebut adalah salah satu jembatan terbaik untuk mewujudkan janji presiden pada rakyat, yaitu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas kehidupan rakyat.

Oleh karena itu, menurut Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP), Abdulhamid Dipopramono, untuk menteri-menteri yang baru dilantik diharapkan harus transparan sejak awal menjabat, karena hal itu akan menjadi modal awal kepercayaan publik kepada mereka. Untuk itu mereka dituntut melakukan perbaikan kondisi bangsa dan meningkatkan harapan publik. Mengenai ketokohan, kredibilitas, kapabilitas, dan integritas mereka, Abdulhamid menilai itu hak prerogatif presiden. Namun demikian, rekam jejak mereka dinilainya dapat menumbuhkan harapan publik. Menurutnya, jika para menteri dan kepala badan yang baru ini dapat meyakinkan rakyat tentang kebijakan yang akan mereka ambil, maka ekspektasi dan optimisme rakyat akan meningkat. Hal ini juga akan meningkatkan kepercayaan kembali rakyat kepada Presiden Jokowi dan pemerintahan secara umum.

Namun demikian, perombakan kabinet dan harapan adanya perbaikan tingkat kepercayaan publik merupakan modalitas politik yang berharga bagi pemerintahan Jokowi dalam mengawal program-program kerja kabinet kerja ini. Hal ini tidak berlebihan seiring dengan semakin besarnya tantangan perekonomian nasional sementara situasi perekonomian kawasan

dan global belum sepenuhnya memberikan arah pemulihan yang lebih memberikan peluang keuntungan ekonomis bagi Indonesia. Tekanan lemahnya arus modal masuk ke perekonomian negara-negara berkembang, turunnya nilai tukar rupiah dan jatuhnya harga minyak dunia misalnya, menggambarkan tidak kondusifnya situasi perekonomian kawasan dan global saat ini.

Penutup

Kebijakan *reshuffle* kabinet yang dilakukan oleh Presiden Jokowi merupakan kebijakan yang diambil untuk memperbaiki kinerja para menteri pada Kabinet Kerja dalam pemerintahan saat ini. Berbagai persoalan publik yang perlu dibenahi ke depannya, tidak hanya di bidang ekonomi yang saat ini mengalami penurunan, namun juga bidang lain seperti politik, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan negara. Dengan adanya *reshuffle* kabinet ini, Presiden Jokowi telah mengambil suatu kebijakan dalam mengevaluasi kinerja kabinet kerja, sehingga diharapkan dapat memberikan perubahan pada kondisi bangsa ke arah yang lebih baik. Menteri-menteri yang baru dilantik, diminta untuk lebih terbuka kepada publik tentang program kerja mereka. Selain itu, *reshuffle* kabinet diharapkan dapat mempercepat gerakan pemerintah dalam bekerja sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan secara efektif dan efisien, juga meningkatkan hubungan kerjasama baik tingkat nasional maupun internasional.

Kebijakan *reshuffle* kabinet yang diambil oleh Presiden Jokowi tidak serta merta menjadi satu-satunya jalan untuk mengatasi persoalan yang ada saat ini. Meskipun kebijakan ini merupakan hak prerogatif presiden dalam memilih para menterinya, akan tetapi tidak dapat dipungkiri juga terdapat konsolidasi politik di dalamnya. Namun demikian, kebijakan ini sebaiknya dapat disikapi secara positif karena masih banyak kebijakan yang harus diambil dan dilaksanakan guna mengatasi dan menghadapi dinamika nasional dan global. Dibutuhkan komitmen dan dedikasi yang tinggi dari para menteri dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam mengelola kebijakan dalam kementeriannya masing-masing. Terlebih lagi kementerian

koordinator yang harus mempunyai komunikasi yang baik antar kementerian sehingga tepat dalam mengimplementasikan kebijakannya dan dapat dirasakan manfaatnya sampai ranah masyarakat bawah.

Referensi

- Harry Siswoyo, Nila Chrisna Yulika, Eka Permadi, dan Arie Dwi Budiawati, Mimpi Besar Dibalik Perombakan Kabinet, pada <http://fokus.news.viva.co.id/news/read/660522-mimpi-besar-di-balik-perombakan-kabinet> diakses pada tgl 24-8-2015.
- Luqman Rimadi, Jokowi Laporkan Reshuffle Kabinet Dan Puji Kinerja MPR, pada <http://news.liputan6.com/read/2293524/jokowi-laporkan-reshuffle-kabinet-dan-puji-kinerja-mpr> diakses pada tgl 24-8-2015.
- Luqman Rimadi dan Ilyas Istianur Praditya, Reshuffle Kabinet Jokowi Lantik 5 Menteri Dan Seskab Baru, pada <http://m.liputan6.com/news/read/2291949/reshuffle-kabinet-jokowi-lantik-5-menteri-dan-seskab-baru> diakses pada tgl 24-8-2015.
- Nur Khafifah, Para Menteri Baru Diminta Lebih Terbuka Terhadap Publik, pada <http://news.detik.com/berita/2990505/para-menteri-baru-diminta-lebih-terbuka-terhadap-publik> diakses pada tgl 24-8-2015.
- Survey Kompas 59 Persen Masyarakat Tidak Puas Dengan Kinerja Kabinet Jokowi, pada <http://suarajakarta.co/news/politik/survey-kompas-59-persen-masyarakat-tidak-puas-dengan-kinerja-kabinet-jokowi/> diakses pada tgl 25-8-2015.
- Survei Tak Puas Kinerja Mayoritas Publik Minta Perombakan Kabinet, pada <http://nasional.kompas.com/read/2015/04/19/15311891/Survei.Tak.Puas.Kinerja.Mayoritas.Publik.Minta.Perombakan.Kabinet> diakses pada tgl 25-8-2015.
- Syahrul Ansyari dan Nila Chrisna Yulika, Alasan Jokowi Rombak Kabinet Kerja, pada <http://politik.news.viva.co.id/news/read/660396-alasan-jokowi-rombak-kabinet-kerja> diakses pada tgl 24-8-2015.